

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Kegagalan Kudeta Militer Turki Tahun 2016

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Juani, M Kholit;Alunaza SD, Hardi
Publisher	Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-03 12:28:43
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/161531

Kegagalan Kudeta Militer Turki Tahun 2016

M Kholit Juani, Hardi Alunaza SD

Magister Ilmu Hubungan Internasional, Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

cholithjuani@gmail.com

Abstrak

Kudeta militer yang dilakukan oleh militan Turki yang terjadi pada 15 Juli 2016 merupakan salah satu bentuk protes yang dilakukan oleh kelompok militer terhadap pemerintah Erdogan karena menurut kelompok militer tersebut, presiden Erdogan diindikasikan telah menyalahi konstitusi yang demokratis dan sekuler. Kelompok militer yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan Turki ini didalangi oleh sejumlah pejabat militer Turki. Paper ini bersifat eksplanatif, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk *paper* ini adalah dengan melalui studi pustaka, dimana data yang didapat dari sumber sekunder. Sumber tersebut dapat berasal dari buku, jurnal, artikel internet ataupun data lain yang dianggap jelas. Berdasarkan teori dan data yang digunakan, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kudeta yang dilakukan oleh sejumlah militer Turki terhadap presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah gagal dilakukan. Hal ini disebabkan karena Erdogan mendapatkan banyak dukungan yang kuat dari rakyat Turki dan sebagian polisi yang berani turun langsung ke jalan untuk melawan kudeta militer tersebut.

Kata kunci : Kudeta, Demokrasi Damai, Turki

PENDAHULUAN

Turki telah mengakhiri rezim militer dan mengalahkan ideologi kudeta sejak terpilihnya Erdogan sebagai pemimpin baru di Turki. Selain itu, Turki dalam era kepemimpinannya yang baru telah menetapkan berbagai reformasi maupun kebijakan-kebijakan baru yang lebih cenderung mengurangi campur tangan militer dalam sistem pemerintahannya. Kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan ini tidak hanya untuk kepentingan partainya saja namun juga untuk seluruh rakyat. Turki telah mendapatkan kemenangan yang demokratis dari rakyat.

Atas kemenangannya ini terdapat berbagai dimensi dan perubahan yang mendasar dan telah menjadi konsekuensi dari sebuah amandemen konstitusi Turki, yang mana amandemen tersebut telah membuat Turki mengalami pembaharuan. Dimensi-dimensi yang telah mengalami perubahan tersebut antara lain pertama, diakhirinya campur tangan militer dalam sistem politik dan

pemerintahan di Turki, sehingga tugas dan kewenangan yang diberikan pemerintah terhadap militer hanya sebatas pada pertahanan negara saja. Dengan diberlakukannya peraturan baru ini, maka Dewan Permusyawaratan Tertinggi Militer tidak lagi dapat melindungi para perwiranya yang terkena kasus kejahatan ketika dilakukan investigasi, sehingga mereka hanya bisa mengajukan tuntutan hukum di hadapan pengadilan sipil.

Kedua, adanya penghapusan mengenai peraturan perundangan pasal 15 yang bersifat temporer dan konstitusi kudeta pada tahun 1982, dimana terdapat larangan dalam pengajuan tuntutan hukum terhadap para pelaku dan otak dari kudeta militer pada tahun 1980, yang memberikan kewenangannya terhadap para korban dari kudeta tersebut untuk dapat mengajukan tuntutan hukum kepada mereka yang diadukan ke pengadilan. Dengan dihapusnya pasal ini secara tidak langsung juga telah menghambat aksi kudeta militer terhadap demokrasi ataupun upaya apapun untuk melarang kehendak rakyat.

Ketiga, amandemen konstitusi tersebut telah membatasi dan mengurangi secara signifikan beberapa poin penting serta campur tangan pengadilan seperti yang terjadi pada lembaga Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Konstitusi melalui demokrasi sebagai bagian dari dirinya; yaitu dengan penambahan anggota baru pada masing-masing lembaga tersebut. Dengan penambahan anggota dalam lembaga tersebut maka akan mengubah perimbangan kekuatan di dalamnya.

Keempat, dengan perubahan Amandemen Konstitusi ini maka akan melindungi partai-partai politik dari ancaman pembubaran yang sewenang-wenang. Pembubaran partai ini menjadi tanggung jawab parlemen dan bukan lagi menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi. Pembubaran dapat dilakukan ketika partai tersebut melakukan tindakan anarkisme dan melawan konstitusi. Kelima, amandemen konstitusi ini telah membentangkan beberapa perubahan besar terhadap anak-anak, kaum perempuan, dan para lansia dari belunggu Mahkamah Konstitusi yang telah lama tertanam dalam diri mereka, serta telah menghapuskan larangan penggunaan jilbab, memperkeras suara *adzan* maupun pembacaan surat-surat Al-Quran. Singkatnya, pada dasarnya amandemen konstitusi yang telah dilaksanakan pada September 2010 telah melahirkan Turki

dalam periode baru dari segi keamanan, militer, pengadilan, dan politik (Taghian, 2015).

Dengan adanya berbagai perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan Turki ini tentu saja terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan atas sistem pemerintahan yang baru tersebut. Hal ini yang pada akhirnya memicu ketegangan antar lembaga, yang pada akhirnya terjadilah kembali kudeta militer yang dilakukan oleh sekelompok pemimpin militer Turki untuk menggulingkan Erdogan. Aksi ini telah terjadi tepatnya pada 15 Juli 2016, yang menyebabkan ketegangan antara militer Turki dengan pemerintah Turki. Namun, aksi ini tidak berlangsung lama, berkat dukungan yang kuat dari rakyat atau pendukung Erdogan, aksi Kudeta ini dapat digagalkan dalam kurun waktu yang tidak lebih dari 24 jam.

Banyak yang berspekulasi bahwa aksi kudeta militer ini didalangi oleh Fethullah Gullen yang pada waktu terjadinya aksi kudeta militer tersebut sedang berada di Amerika Serikat. Namun, banyak pula yang beranggapan bahwa kudeta militer yang terjadi pada Juli 2016 tersebut hanyalah skenario Erdogan tentang kekuatan dan kekuasaan Erdogan sehingga dapat memunculkan spekulasi baru pada rakyat Turki maupun di mata dunia dan menjadikan dirinya sebagai Presiden seumur hidup.

Tulisan ini disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian “Faktor-faktor apa yang menyebabkan gagalnya kudeta militer Turki tahun 2016?”. Tulisan ini terbagi menjadi tiga poin penting dalam menjelaskan fenomena terkait gagalnya kudeta militer di Turki tahun 2016. Pertama, penjelasan mengenai sejarah kudeta dan dukungan yang kuat dari penduduk Turki. Kedua, belum berhasilnya faksi militer mengambil alih objek vital di Turki. Serta, tidak adanya dukungan yang kuat dari pihak asing.

Tabel I: *Literature Review*

Nama	Judul	Hasil
Miftachul Choir Al Ayyubi	Militer dan Politik : Studi Kasus Kudeta Militer pada Presiden Mohammad Mursi di Mesir Tahun 2013	Dalam setiap negara yang menjalankan demokrasi, kudeta dianggap sebagai hal yang melanggar nilai-nilai yang ada pada demokrasi. Kudeta menjadi tindakan yang ilegal karena secara paksa mengambil kekuasaan dari pemerintah yang secara demokratis sudah terpilih lewat pemilu. Tentara yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pengaman negara, namun malah menjadi penentu kebijakan. Membuat demokrasi yang baru saja dijajaki Mesir menjadi tidak sempurna dan mencederai demokrasi secara sesungguhnya.
Afif Pratama Putra	Perbandingan Upaya Freedom of Justice Party (FJP) Mesir dan Adelet Ve Kalkinma Partisi (AKP) Turki dalam Menghadapi Ancaman Kudeta Militer	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan sipil (FJP) yang terbentuk dari pemilu demokratis pertama dalam sejarah Mesir harus kandas karena dibubarkan oleh MK. Hal ini berkebalikan dengan AKP di Turki, dimana setelah memenangi pemilu pertama mereka sejak tahun 2002 berhasil mempertahankan kekuasaan sipil mereka dari rongrongan intervensi militer melalui usaha-usaha kudeta yang beberapa kali dilakukan oleh militer. - Erdogan yang memimpin AKP mampu menjaga eksistensi kekuasaan mereka dalam pemerintahan. - sejak FJP berkuasa pemerintahan Mursi menghilangkan hak istimewa militer dan minim upaya depolitisasi militer. Sedangkan AKP dimana Erdogan mampu mengurangi kewenangan istimewa militer namun tetap memberikan hak pengambilan keputusan politik terkait lingkungan ancaman kepada militer dan berupaya melakukan

		depolitisasi militer
Syarif Taghian	Penghancuran berhala sekularisme Attaturk : Setengah Abad Kudeta	Dalam sejarah Turki menunjukkan bahwa telah terjadi empat kali kudeta militer yang dimulai sejak tahun 1960, 1971, 1980, dan 199

Kerangka Berpikir

Seperti yang telah dijelaskan di atas dan berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada, maka untuk membantu menjelaskan dan menjawab rumusan masalah tersebut, disini penulis menggunakan teori perdamaian demokratik atau *Democratic Peace Theory*. Teori perdamaian demokratik merupakan suatu teori yang menjelaskan bahwa dengan adanya sistem demokrasi pada suatu negara maka dengan sadar negara tersebut akan berusaha untuk menghindari konflik dan lebih memilih perdamaian, terkecuali perang/konflik karena terpaksa dan untuk melindungi diri. Pemahaman ini pertama kali dicetuskan oleh Immanuel Kant pada tahun 1795 silam (Mtholyoke, 2014).

Dengan menggunakan teori tersebut, penulis berusaha mengaitkannya dengan kudeta militer yang terjadi di Turki baru-baru ini. Turki yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya cenderung untuk menggunakan cara-cara yang lebih halus atau sederhana untuk menghadapi hal tersebut. Turki lebih memilih untuk menggunakan kekuatan rakyat untuk menggagalkan proses kudeta yang sedang berlangsung dibanding harus melawan aksi kudeta militer dengan cara perang. Hal ini terlihat dengan aksi rakyat atas dukungan Erdogan sebagai pemimpin negara untuk turun langsung dan berkumpul memenuhi titik-titik di suatu kawasan tertentu untuk memblokade meluasnya serangan dari aksi kudeta militer yang terjadi.

METODOLOGI PENELITIAN

Paradigma penelitian menjelaskan bagaimana peneliti dapat memahami suatu permasalahan, kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian (Guba, 1988). Paradigma yang digunakan dalam menelaah kajian ini ialah paradigma penelitian kualitatif. Dengan menggunakan fakta empiris sebagai

sumber informasi dan pengetahuan, tetapi tidak menggunakan teori yang sudah ada sebagai bahan dasar untuk melakukan proses verifikasi. Proses suatu penelitian merupakan suatu hal yang dianggap lebih penting dibandingkan dengan hasil yang didapat. Maka dari itu, peneliti memiliki peran sebagai pengumpul data dan juga memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap hasil data-data yang telah diperoleh.

Dalam penulisan penelitian ini digunakan pendekatan induksi sebagai suatu cara yang bertujuan untuk menyusun konstruksi teori maupun hipotesa dengan cara pengungkapan fakta. Pengungkapan fakta ini dilakukan dengan melalui pendekatan induksi analisis dan ekstrapolasi. Induksi analitis merupakan suatu pendekatan suatu pendekatan pengolahan data ke dalam konsep-konsep maupun kategori-kategori (bukan frekuensi). Simbol-simbol yang digunakan bukan dalam bentuk numerik, melainkan dalam bentuk deskripsi yang diolah dan diubah datanya ke dalam bentuk formulasi. Ekstrapolasi merupakan suatu cara penarikan sebuah kesimpulan yang dilakukan secara serentak pada saat proses induksi analitis dan dilakukan secara bertahap dari suatu kasus ke kasus yang lainnya, selanjutnya dari proses analisis tersebut dapat dirumuskan menjadi suatu pernyataan teoritis (Dr. H. Mundir, 2013).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan *paper* ini ialah dengan menggunakan studi pustaka yang bersumber dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan baik yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, dan majalah. Selain itu pengumpulan data-data juga dilakukan dengan cara mencari sumber data tersebut melalui berbagai sumber informasi, sumber informasi tersebut dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis, disertasi, internet, dan sumber-sumber lainnya yang dianggap relevan kebenarannya yang berupa cetak maupun elektronik (Suharsono, 1996).

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk tidak langsung seperti dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang diteliti. Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu jenis *research*, teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Untuk menghindari melebarnya penjelasan mengenai Keberhasilan Turki dalam Menggagalkan Kudeta Militer Tahun 2016, maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini, Jangkauan penelitian ini akan dimulai pada Juli 2016. Dimana dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dari sumber yang berasal dari buku, artikel jurnal, majalah maupun internet yang dianggap relevan dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

KEGAGALAN KUDETA MILITER TURKI TAHUN 2016

Turki merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam perkembangannya, telah banyak perubahan baru yang tercipta dari para pemimpin baru Turki. Perkembangan-perkembangan tersebut tercipta atas terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan Turki. Perubahan yang membawa dampak positif bagi Turki bahkan sampai kancah internasional. Namun terjadinya perubahan-perubahan tersebut juga sering kali membawa dampak negatif oleh Turki yang mendorong terjadinya aksi anarkis maupun kudeta militer.

Sejarah Kudeta Militer Turki

Aksi kudeta militer yang terjadi di Turki ini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru bagi Turki. Sebelumnya telah beberapa kali terjadi aksi kudeta militer Turki sebelum kepemimpinan Erdogan. Aksi kudeta militer ini pertama kali terjadi pada tanggal 27 Mei 1960. Walaupun pada masa tersebut telah banyak berbagai perkembangan maupun kemajuan dalam sektor ekonomi, namun kelompok sekuler dengan senantiasa selalu menentang kebijakan-kebijakan politik dan pembangunan yang di putuskan dalam sistem pemerintahan Turki. Sehingga kelompok-kelompok tersebut melakukan konspirasi dan provokasi terhadap pihak militer, yang kemudian mengadakan demonstrasi, serta menimbulkan terjadinya banyak kekacauan dalam masyarakat Turki itu sendiri, yang kemudian hal ini mendorong militer untuk turun tangan.

Pada tahun 1965, partai Keadilan (*Adelet Partisi*) berhasil memenangkan pemilihan umum legislatif. Partai tersebut dipimpin oleh Suleyman Demirel, sang

penguasa bendungan. Suleyman mendapatkan julukan tersebut karena dalam pemimpinannya berfokus pada bidang tersebut. Atas keberhasilannya dalam membangun infrastrukturnya, maka Suleyman mendapatkan popularitasnya atas rakyat Turki yang bangga akan kinerjanya selama memimpin Turki. Hal ini juga mendorong Suleyman menjadi semakin eksis dalam dunia perpolitikan dan membawanya menuju puncak kekuasaan (Taghian, 2015).

Kekuasaan yang diperoleh Suleyman hanya bertahan hingga tahun 1970. Setelah itu, ia kehilangan kekuasaannya. Hal ini disebabkan karena adanya kekacauan dalam kalangan kelompok muslim yang bersitegang karena berdebat untuk menentukan siapa yang lebih berhak dalam mewarisi partai tersebut. Hal ini mendorong terjadinya kudeta militer yang kedua kalinya di Turki, yang terjadi pada tanggal 12 Maret 1971.

Kemudian pada tanggal 12 September 1980, terjadilah kudeta militer yang ketiga di Turki dengan kondisi dalam negerinya yang tidak jauh berbeda. Kudeta militer yang ketiga ini lebih bersifat kedaerahan, yang artinya Turki harus melawan pemberontakan yang berasal dari suku Kurdi di sisi lain negara tersebut. Selain itu, suasana politik yang terjadi di tingkat regional kawasan Turki juga sedang mengalami pergolakan, dimana sedang terjadi revolusi islam di Iran, terjadinya perang teluk antara Iran dengan Irak, dan pergolakan-pergolakan internasional lainnya (Taghian, 2015).

Kudeta yang ketiga ini menimbulkan kesan yang mendalam bagi ranah politik Turki. Dalam kudeta militer kali ini, militer semakin memperkuat eksistensinya di dalam panggung politik Turki. Meskipun ada undang-undang yang melarang adanya campur tangan militer dalam sistem politik di Turki, namun peraturan itu tidak pernah bisa diterapkan secara maksimal.

Selanjutnya pada tanggal 28 februari 1997, terjadi kembali kudeta militer yang keempat. Kudeta militer yang terjadi di Turki kali ini dikenal dengan sebutan "*kudeta post modern setelah kudeta*". Kudeta tersebut terjadi dimana ketika pihak militer mengerahkan semua pasukannya untuk menurunkan senjata berlapis baja ke jalan-jalan di Ankara dan memaksa perdana menteri yang ketika itu dijabat oleh Necmettin Erbakan untuk mengundurkan diri dari jabatannya (Taghian, 2015).

Gagalnya Kudeta Militer Turki 2016

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berhasilnya Turki dalam menggagalkan kudeta militernya pada Juli 2016 kemarin, kudeta militer yang berlangsung singkat tersebut dapat dikalahkan karena terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi atas kegagalan kudeta militer tersebut, faktor-faktor tersebut ialah;

Pertama, Adanya dukungan yang kuat dari rakyat Turki. Kudeta militer yang dilakukan oleh sekelompok anggota militer dan pejabat tinggi terlibat lainnya terjadi dini hari pada tanggal 15 Juli 2016, yang dimana pada waktu kejadian tersebut Erdogan sebagai pemimpin negara tersebut sedang tidak berlibur dan tidak berada di wilayah tersebut. Namun Erdogan berjanji dan akan berupaya untuk menggagalkan kudeta militer tersebut. Dengan datangnya presiden Erdogan kembali ke Istanbul pada 16 Juli 2016 sekaligus menjadi pertanda bahwa kudeta yang dilakukan oleh kelompok tersebut telah berhasil digagalkan (pratama, 2016).

Hal ini tak lepas dari adanya dukungan yang kuat dari rakyat Turki terhadap pemimpin negaranya tersebut. Selama berada di luar kota, presiden Erdogan selalu berusaha untuk terus berkomunikasi dan mengetahui info terbaru mengenai peristiwa tersebut. Presiden Erdogan juga meminta rakyat Turki untuk tidak takut ataupun panik dengan adanya kudeta militer tersebut. Erdogan meminta dukungan dari masyarakat Turki dan memintanya untuk turun ke jalan dan saling bekerja sama untuk menggagalkan upaya perebutan kekuasaan tersebut.

Pada 16 Juli dini hari, terdapat sekitar 30 anggota polisi pro-kudeta meletakkan senjata mereka karena telah terkepung oleh pasukan polisi bersenjata yang berada di pihak lainnya di lapangan Taksim, Istanbul. Sementara itu, banyak jet-jet tempur dari para pendukung kudeta terbang rendah, yang menyebabkan terjadinya getaran dan kerusakan di gedung-gedung di kawasan tersebut. Menyusul hal tersebut, kelompok pro-pemerintahan kembali menangkap beberapa anggota pelaku kudeta militer di beberapa wilayah lainnya.

Dengan adanya dukungan yang kuat dari rakyat Turki ini menimbulkan sebuah momentum dimana para pelaku kudeta militer ini kehilangan kesempatannya untuk melakukan kudeta militer. Berkat komunikasi dan hubungan yang baik antara Erdogan dengan rakyatnya telah membuat rakyat Turki tidak bersembunyi dan mengikuti perintah Erdogan untuk bersama turun ke jalan dan melawan ancaman kudeta tersebut. Mereka membanjiri sepanjang jalan dan lapangan di wilayah tersebut, serta mengibarkan bendera-bendera Turki dan menyerukan dukungannya terhadap pemerintahannya yang sekarang (pratama, 2016).

Kedua, belum berhasilnya faksi militer pelaku kudeta mengambil alih obyek vital di Turki. Serangan dan ancaman yang dilakukan oleh sejumlah militer di Turki atas kudetanya telah mendapatkan perlawanan sengit dari kelompok maupun masyarakat yang pro pemerintah. Mereka saling membahu untuk memblokade jalan dan berkumpul di titik-titik penting di beberapa wilayah di Turki. Perlawanan dari masyarakat Turki terhadap pihak kudeta militer tersebut dibantu oleh sejumlah militer yang masih atau berada di posisi pro-pemerintahan, akibatnya, serangan kudeta militer yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemberontak tersebut dapat di blokade dan tidak dapat memasuki kawasan-kawasan penting maupun obyek-obyek vital yang dimiliki oleh Turki, seperti gedung Parlemen, Istana Kepresidenan, dan sebagainya, walaupun beberapa di antaranya telah dikuasai oleh para pelaku pro-kudeta, namun hal tersebut belum mampu untuk merebut kekuasaan.

Ketiga, tidak adanya dukungan yang kuat dari negara asing. Keberhasilan kudeta militer sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu logistik, penguasaan media, dan adanya dukungan dari negara lain. Jika salah satu dari ketiga faktor tersebut tidak ada, maka kudeta militer yang dilakukan akan mengalami tingkat risiko kegagalan yang cukup tinggi. Dengan adanya dukungan ataupun intervensi dari negara lain, secara tidak langsung akan menambah kekuatan atau *power* suatu pelaku kudeta untuk mendapatkan keinginannya.

Hal ini sama ketika kudeta militer yang sedang berlangsung di Turki pada Juli 2016 silam. Kurangnya perhitungan serta dukungan dari negara asing seperti

Amerika Serikat, Arab Saudi, maupun Uni Eropa menyebabkan kudeta militer yang dilakukan dapat dengan mudah digagalkan oleh kelompok pendukung pemerintahan. Upaya dan kerja keras serta adanya pengaruh yang kuat dari pemimpin Turki merupakan hasil yang nyata dalam keberhasilannya menggagalkan kudeta militer tersebut. Akibatnya, banyak anggota militer maupun anggota parlemen yang pro-kudeta dan hakim maupun orang-orang yang dianggap terlibat dalam aktivitas kudeta tersebut mendapatkan hukuman hukumannya (Arifan, 2016).

Dalam kejadian kudeta militer tersebut telah memakan korban sedikitnya 63 dari pasukan pro-pemerintahan dan 104 tentara yang berasal dari pro kudeta meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 8000 lebih anggota militer dan hakim ditangkap karena diduga ada hubungannya dengan tindakan kudeta militer yang sempat berlangsung tersebut.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya pemberontakan atau kudeta militer di Turki tahun 2016 kemarin bukan merupakan tindakan kudeta untuk yang pertama kalinya. Sebelumnya telah terjadi beberapa kali tindakan kudeta militer di Turki yang di lakukan oleh sekelompok anggota yang ingin melawan dan merebut kekuasaan. Tindakan kudeta militer Turki tersebut pertama kali dilakukan pada tahun 1960. Kemudian terjadi kudeta yang kedua pada tahun 1971 karena terjadinya pergolakan antar umat muslim tentang perebutan pewaris partai yang didirikan oleh Adnan Menderes. Kudeta militer yang ketiga terjadi pada tahun 1980, dimana dengan kondisi politik dalam negeri yang tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Selanjutnya terjadi kudeta militer yang keempat pada tahun 1997, dimana pihak militer meminta perdana menteri Necmettin untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dan kemudian terjadilah peristiwa kudeta militer yang terakhir pada Juli 2016 kemarin, dimana dalam kudeta ini meminta Erdogan sebagai pemimpin negara tersebut untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Namun aksi kudeta militer tersebut dapat dengan mudah digagalkan oleh pemerintah Turki dikarenakan kuatnya dukungan

dari rakyat terhadap pemerintahannya yang sekarang, mereka berani turun langsung ke jalan untuk melawan aksi kudeta militer tersebut. Selain itu, tidak berhasilnya kelompok pro-kudeta menguasai obyek-obyek penting dari Turki seperti gedung-gedung penting serta bandara dan lain sebagainya juga menjadi salah satu faktor kegagalan kudeta militer Turki. Dan kelompok pro kudeta tersebut juga tidak mendapatkan dukungan yang kuat dari negara lain untuk membantu merebut kekuasaan. Tulisan ini hanya ingin menegaskan bahwa gagalnya kudeta militer di Turki tahun 2016 disebabkan oleh tiga faktor utama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Terkait hal ini, bisa jadi ada hasil penelitian yang berbeda mengenai gagalnya kudeta militer di Turki jika diteliti oleh peneliti lain dari sudut pandang dan bahasan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arifan. 2016. *Kegagalan dan Keberhasilan Sebuah Kudeta*. Retrived from: Jurnal muslim; <http://www.jurnalmuslim.com/2016/07/keberhasilan-dan-kegagalan--sebuah-kudeta.html?m=1>
2. Dr. H. Mundir, M.pd. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press.
3. Guba, E.G., and Lincoln, Y.S. 1988. "Do Inquiry Paradigms Imply Inquiry Methodologies?" In *Qualitative Approaches to Evaluation in Education. The Silent Scientific Revolution*, New York: Preager, hal 80-115.
4. Indonesia, Jurnal (2016). *Tanpa Adanya Dukungan Dari Rakyat, Kudeta Telah Gagal*. Jakarta: Jurnal Media Pratama
5. Mtholyoke, *Immanuel Kant Perpetual Peace: A Philosophical Sketch*. Retrived from <http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm>
6. Suharsono. 1996. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Bentang Budaya
7. Taghian, Syarif. 2015. *Erdogan, Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki*. Jakarta: Pustala Al-Kautsar.